

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh

HANNYSA PUTRI HERDIFA

01870624189



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : HANNYSA PUTRI HERDIFA
NIM : 01870624189
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF
TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 198208062006042002

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
NIP. 197008261999032001

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Jhon A Frizal, S.HI, MA
NIP. 197909112011011003



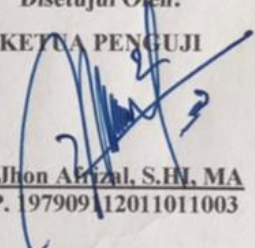
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : HANNYSA PUTRI HERDIFA
NIM : 01870624189
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF
TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH
PENYITAAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PEKANBARU TAMPAN
TANGGAL UJIAN : 10 AGUSTUS 2021

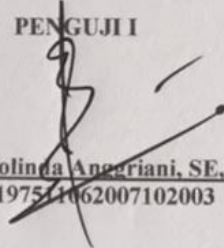
Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

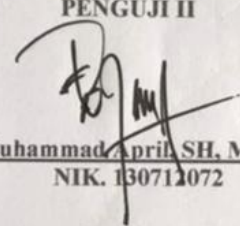

Dr. Jhon Arizal, S.H., MA
NIP. 19790912011011003

MENGETAHUI

PENGUJI I


Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
NIP. 197511062007102003

PENGUJI II


Dr. Muhammad April SH, M.Hum
NIK. 130712072



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Oleh

HANNYSA PUTRI HERDIFA
01870624189

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan bagian seksi penagihan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sedangkan data sekunder diperoleh dari data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berfluktuasi. Penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan kurang berkontribusi terhadap target disebabkan penerimaan negara dalam bidang perpajakan hal ini dibuktikan penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan hanya berkontribusi sebesar 25,68% pada tahun 2017 , 8,16% pada tahun 2018, 2,82% pada tahun 2019, dan 8,13% pada tahun 2020.

Kata Kunci : Penagihan, Tunggakan Pajak, Surat Perintah Penyitaan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**CONTRIBUTION TO ACTIVE BILLING ACTIONS OF TAX ARREARS
WITH FORECLOSURE ORDERS TO TAX RECEIPTS AT THE
PRATAMA TAX SERVICE OFFICE PEKANBARU
TAMPAN**

By

HANNYSA PUTRI HERDIFA
01870624189

This research was conducted at the Pekanbaru Tampan Pratama Tax Service Office, this study aims to determine the contribution of tax collection with a warrant to carry out confiscation of tax revenues at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. This study uses a qualitative method. Primary data was obtained from interviews and direct observations with the billing section at KPP Pratama Pekanbaru Tampan while secondary data was obtained from processed data from the relevant agencies and data used to support research results obtained from documentation, books, and scientific journals. From the results of the analysis, it can be concluded that tax collection with a warrant for confiscation at KPP Pratama Pekanbaru Tampan fluctuated. Tax collection with a warrant for confiscation at KPP Pratama Pekanbaru Tampan did not contribute to the target due to state revenue in the taxation sector, this is evidenced by tax collection with a warrant for confiscation only contributed 25.68% in 2017, 8.16% in 2018, 2.82% in 2019, and 8.13% in 2020.

Keywords: *Collection, Tax Arrears, Foreclosure Warrant*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad serta Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Tunggakan Pajak Dengan Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawāt beriringkan salam senantiasa penulis ucapkan kepada Rasūlullāh *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallām*, suri tauladannya ummat yang telah sukses menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah. Semoga kita tetap istiqāmah kepada keduanya dan berpegang teguh padanya hingga akhir hayat, serta dengannya menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai beliau.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Orang tua yang tercinta Ayahanda Zulfami dan Ibunda tercinta Sutihermi Abang tercinta Muhammad Aghib Herdifa dan Adik-adik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tersayang Nabila Muthia Herdifa dan Aufa Ramadhani Herdifa serta keluarga besar yang telah mendoakan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini .

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Ibu Dr. Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

6. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10. Bapak Alchudri, S.E., CA., M.M., CPA. Selaku Pembimbing Akademis Penulis yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama penulis menjadi Anak Didiknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini. .

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalāmu’alaikum Waraḥmatullāh Wabarakātuh.

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis

HANNYSA PUTRI HERDIFA
NIM. 01870624189

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Pembahasan	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	11
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	11
2.2 Kedudukan Tipologi, Tugas, dan Fungsi	12
2.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tampan.....	15
2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru	
Tampan.....	16
2.5 Uraian Tugas (<i>Job Description</i>) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	19
2.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	22
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	24
3.1 Tinjauan Teori.....	24
3.1.1 Kontribusi.....	24
3.1.2 Pengertian Pajak	25
3.1.3 Fungsi Pajak.....	26
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	26
3.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	28
3.1.6 Sanksi Pajak.....	28
3.1.7 Penagihan Pajak dan Utang Pajak	33
3.1.8 Penagihan Pajak Aktif	39
3.1.9 Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(SPMP).....	46
3.2 Tinjauan Praktek.....	53
3.2.1 Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020	53
3.2.2 Target dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Pada Tahun 2017 - 2020.....	56
3.2.3 Pengaruh Realisasi Tindakan Penagihan Aktif menggunakan SPMP Terhadap Realisasi Seluruh Tindakan Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Pada Tahun 2017 - 2020.....	57
3.3 Perbandingan Teori dan Praktek	58
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Tunggal Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2017-2020.....	5
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	25
Tabel 3. 2 Sanksi Administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	29
Tabel 3. 3 Jadwal Penagihan Pajak	40
Tabel 3.4 Presentase Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Menggunakan SPMP Terhadap Target Pada Tahun 2017 - 2020	56
Tabel 3. 5 Realisasi Tindakan Penagihan Aktif Menggunakan SPMP Terhadap Seluruh Tindakan Penagihan Aktif Pada Tahun 2017- 2020.....	57

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru	
Tampan	18
Gambar 3. 1 Mekanisme penagihan Pajak Aktif	43





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang berguna bagi pelaksanaan dan peningkatan dalam hal pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan pajak digunakan dalam pelayanan umum untuk mempercepat capaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum untuk meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, kesehatan untuk meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, pendidikan untuk meningkatnya angka partisipasi pendidikan dan perlindungan sosial untuk meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses masyarakat kurang mampu (Kemenkeu, 2017).

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban dan besarnya pajak yang harus disetor. Sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif sedangkan fiskus hanya mengawasi, sehingga adanya kemungkinan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti halnya Wajib Pajak telat membayar kewajiban pajak terutangnya atau melakukan kecurangan yaitu dengan mengecilkan jumlah pajak yang terutang sehingga dapat menimbulkan tunggakan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam peningkatan penerimaan pajak, namun dalam kenyataannya masih adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Utang pajak timbul dikarenakan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh fiskus, Surat Ketetapan Pajak memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak dengan Jangka Waktu 1 (satu) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak. Adanya tunggakan pajak yang masih belum dapat diimbangi dengan pencairan tunggakan pajaknya, maka perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan dengan *self assessment system* yang berlaku sekarang penagihan pajak yang dilaksanakan dapat berjalan secara konsisten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Penyitaan pada pasal 1 ayat (9) bahwa:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar peangggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.”

Sehingga tujuan dari penagihan pajak agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan Pajak memiliki fungsi sebagai tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan sebagai tindakan pengamanan penerimaan Negara.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Dalam memungut pajak melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, juru sita berhak menyita harta wajib pajak. Untuk penyitaan harta milik Wajib Pajak, dilakukan pengawasan secara rinci, jelas dan tegas, termasuk status, nilai dan lokasi penyimpanan atau penitipan harta sitaan milik perusahaan asuransi pajak tanpa henti perlindungan. Untuk kepentingan pihak ketiga dan masyarakat wajib pajak. Dalam penagihan aktif ini terkadang jurusita Pajak juga mengalami kesulitan karena Wajib Pajak yang tidak terima dengan adanya Surat Paksa dan menolak dilakukan penyitaan atas barang-barang atau harta kekayaan dari Wajib Pajak.

Setiap pelaksanaan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi. Jika penanggung pajak adalah badan maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan di tempat umum dan berlaku sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitahuan maksud tindakan juru sita pajak pada penanggung pajak atas barang yang disita atau diberi segel sita.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hal lainnya yang dapat disita diatur dengan peraturan pemerintah. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. Tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam rangka memaksa kepatuhan Wajib Pajak, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindakan penagihan aktif diharapkan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan tunggakan pajaknya, sehingga penerimaan pajak yang optimal dapat tercapai. Penelitian ini mengetahui seberapa besar kontribusi tindakan penagihan aktif dengan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap tunggakan pajak.

Penelitian berfokus pada penagihan aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dikarenakan Surat Perintah Melaksanaan Penyitaan mempunyai waktu 14 hari dalam pelaksanaan tindakan sita dan waktu 14 hari dengan pengumuman lelang. KPP Pratama Pekanbaru Tampan merupakan Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengemban tugas untuk mengamankan Penerimaan Negara dari sektor perpajakan setiap tahunnya. Alasan peneliti memilih KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah Tampan merupakan wilayah padat penduduk dan perkantoran, sehingga



mempunyai potensi untuk menggali penerimaan pajak dan memungkinkan terdapatnya Wajib Pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali dan menimbulkan tunggakan pajak. Selain itu KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai perkembangan tunggakan Pajak tahun 2018-2020 yang memperlihatkan adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak.

Tabel 1. 1 Data Tunggakan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2017-2020

SUBJEK PAJAK	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Badan	432.086.846.703	479.135.144.063	493.939.284.208	507.824.150.372
Orang Pribadi	4.966.893.801	5.378.739.160	6.334.632.804	7.542.927.598
Jumlah	437.053.740.503	484.513.883.222	500.273.917.012	515.367.077.970

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat peningkatan jumlah tunggakan pajak cukup signifikan terbukti pada tahun 2017 sebesar Rp 437.053.740.503. pada tahun 2018 sebesar Rp 484.513.883.222. Pada tahun 2019 sebesar Rp 500.273.917.012. Pada tahun 2020 sebesar Rp 515.367.077.970. Tunggakan pajak tahun 2017 sampai dengan 2020 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2017-2020 ini perlu adanya tindakan pencairan tunggakan pajak, yaitu salah satunya penagihan aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dari pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Melalui penagihan aktif yang terjadi tahun 2017-2020 mengindikasikan

bahwa tindakan penagihan aktif belum berjalan secara efektif. Hal inilah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Tunggakan Pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi penagihan aktif tunggakan pajak dengan Surat Perintah Penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?
2. Bagaimana prosedur penagihan aktif tunggakan pajak dengan Surat Perintah Penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?
3. Apakah tindakan penagihan aktif dengan Surat Perintah Penyitaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi penagihan aktif dengan Surat Perintah Penyitaan terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Untuk mengetahui prosedur penagihan aktif dengan Surat Perintah Penyitaan terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

3. Untuk mengetahui Pengaruh penagihan aktif dengan Surat Perintah Penyitaan terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, Menambah wawasan dan pengetahuan menyangkut seberapa besar kontribusi tindakan penagihan aktif tunggakan pajak dengan surat perintah penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan.
- b. Bagi Penulis, Sebagai bahan tugas akhir dalam menyelesaikan studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Bagi Instansi, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada Instansi terkait dan pihak yang membutuhkan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan Jl. Rajawali Sakti, 28293, Tampan, Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 26 Mei 2021 - Juli 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2 Jenis Data

1. Data Primer

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:89) data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok focus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang bertujuan sebagai informasi terkait penagihan pajak aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016: 402) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, data dan dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan Kota Pekanbaru, peraturan- perundangan dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu:

a. Pengamatan secara langsung (Observasi)

Pengamatan secara langsung mengenai prosedur penagihan aktif dengan Surat Perintah Penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

b. Dialog dengan pihak-pihak terkait (Wawancara)

Metode wawancara atau tanya dilakukan langsung dengan pegawai atau

petugas pajak untuk mendapatkan data atau informasi yang berguna dalam menyusun tugas akhir.

c. Studi literatur

Pengumpulan data dengan studi literatur yaitu mempelajari dan menelaah prosedur penagihan aktif dengan surat perintah penyitaan di berbagai sumber

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, dan Uraian Tugas (*Job Description*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisi tentang teori yang diperlukan sebagai dasar pembahasan, berupa pengertian dan definisi yang dikutip dari buku dan beberapa literatur berkaitan dengan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagian wilayah kota Pekanbaru yang meliputi 5 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tampan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Bukit Raya
5. Kecamatan Sukajadi

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa.

2.2 Kedudukan Tipologi, Tugas, dan Fungsi

2.2.1 Tipologi

Perubahan yang terjadi di KPP Pratama Tampan DJP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern antara lain adalah organisasi yang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak. KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP Pratama, Wajib Pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Berbeda dengan KPP WP Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagian kecil WP Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama akan menangani WP Badan kelas menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai ribuan, WP Orang Pribadi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembentukan KPP Pratama Tampan sendiri tidak dimaksudkan untuk

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif, dan kepada perluasan jangkauan pelayanan perpajakan, ekstensifikasi WP Orang Pribadi, serta peningkatan citra DJP di mata masyarakat luas.

KPP Pratama Tampan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-karakteristik antara lain: organisasi yang berdasarkan fungsi, system informasi yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Sistem hukum pajak sebagai hukum publik yaitu sifatnya yang sangat dinamis mengikuti perkembangan lingkungannya, seperti politik, ekonomi, praktik bisnis, dan lain sebagainya. Diharapkan, dengan penggabungan kedua sistem tersebut akan tercipta suatu sistem informasi yang akan membawa dampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan data. Di sisi lain, sumber daya manusia dalam kantor ini telah menerapkan kode etik yang ketat yang diimbangi dengan pemberian remunerasi yang lebih baik. Setiap pegawai yang akan ditempatkan di kantor yang telah menerapkan administrasi modern wajib menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan kode etik pegawai. Pada KPP Pratama terdapat petugas Account Representative (AR) yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat menghubungi AR baik secara langsung bertatap muka, ataupun melalui telepon, faximile maupun e-mail. Disamping itu, AR juga bertugas untuk mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara intensif.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Tugas

KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyaberdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

2.2.3 Fungsi

Dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan, Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, erta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, Pelaksanaan ekstensifikasi, Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan dalam penagihanpajak, Pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pengawasan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan, Pelaksanaan konsultasi perpajakan, Pelaksanaan intensifikasi, Pembetulan ketetapan pajak Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelaksanaan administrasi kantor.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional
Kompensasi yang kompetatif berbasis sistem manajemen kinerja.

c. Nilai

1. Integritas
Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme
Memiliki kompetensi di bidang profesi, bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

5. Kesempurnaan

Melakukan upaya perbaikan terus menerus di segala bidang untuk menjadi dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan berhasil, maka diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mereka akan dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang di pegang serta kepada siapa bertanggung jawab.

2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan

Adapun bagian/ unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan adalah sebagai berikut:

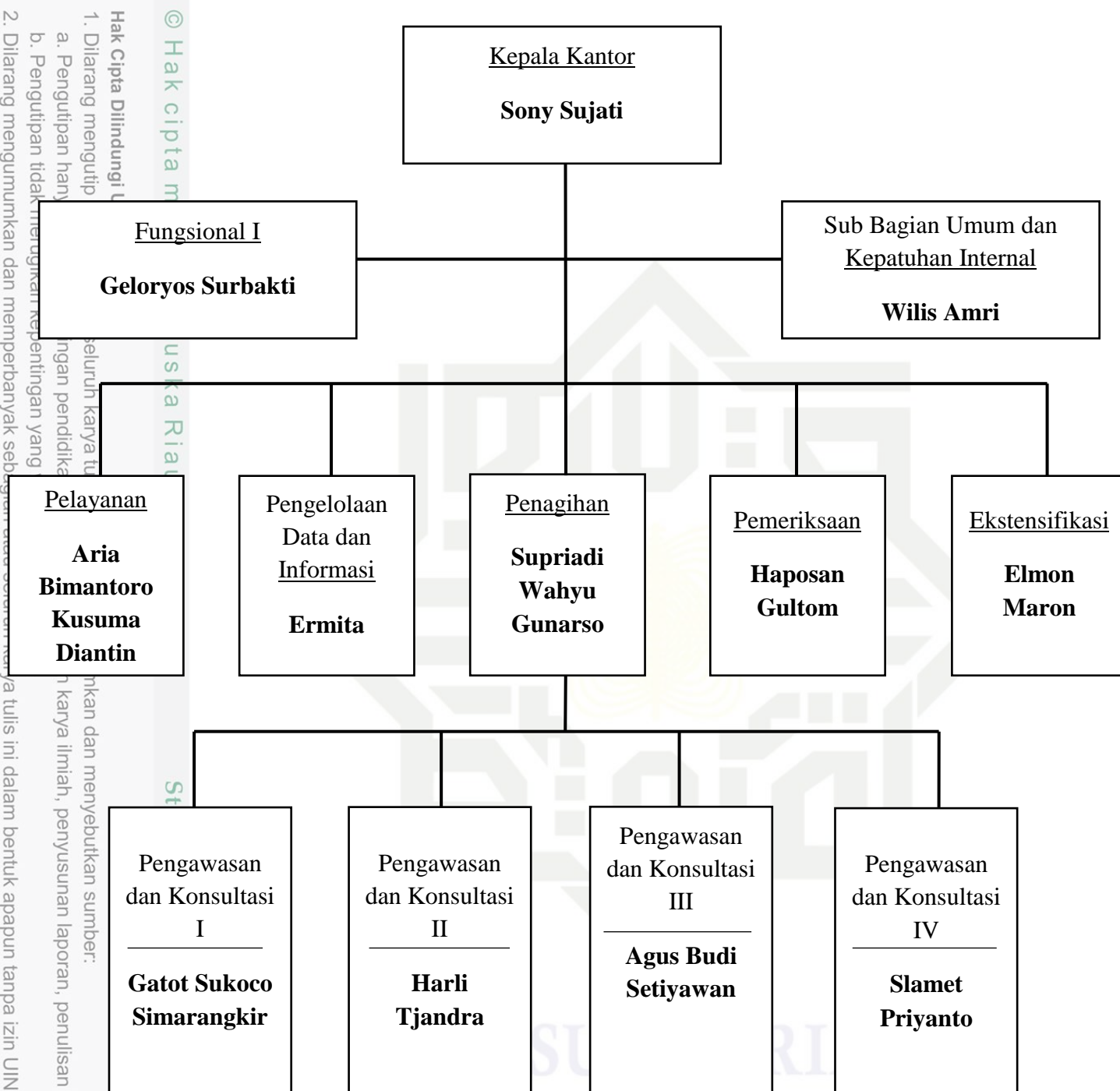
1. Kepala Kantor
2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal
3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi
4. Kasi Pelayanan
5. Kasi Penagihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kasi Pemeriksaan
7. Kasi Ekstensifikasi
8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV
9. Kasi Fungsional





Sumber : (Dashboard KPP Pratama Pekanbaru Tampan:2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Uraian Tugas (*Job Description*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Tugas bagian/unit kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai unit kerja masing-masing yaitu:

a. Kepala Kantor

1. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak
2. Mengkordinasikan rencana percekuran dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
3. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatantata usaha dan kepegawain, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencairan dan pengelolaan data, Penyajian informasi perpajakan, Percekuran dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, pelayanan dukungan teksi komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e- Filing pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan:

1. Membuat keputusan atas permohonan angsuran /penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.
2. Member Surat Tagihan (ST).
3. Penerbitan surat pemerintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak).
4. Pemeriksaan dalam rangka penagihan.
5. Memberikan Surat Paksa (SP).
6. Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank).
7. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
8. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan pajak.

f. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan:

1. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan
2. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
3. Tata cara pemrosesan dan penata dokumen masuk
4. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber –NPWP.
5. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat *fiscall*
6. Tata cara penyelesain mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB
7. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB
8. Tata cara penyelesain mutasi seluruh objek dan subjek PBB
9. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB
10. Tata cara pembentukan / penyempurnaan
11. ata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Peraturan menteri keuangan No 67/PMK.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, angka 43: Wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru tampan adalah daerah administrasi pemerintah dari 5 kecamatan dan 24 kelurahan yang ada di kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Kecamatan Tampan
 - a. Kelurahan Tuah Karya
 - b. Kelurahan Delima
 - c. Kelurahan Simpang Baru
 - d. Kelurahan Sidomulyo Barat
2. Kecamatan Payung Sekaki
 - a. Kelurahan Tampan
 - b. Kelurahan Labuh Baru Barat
 - c. Kelurahan Air Hitam
 - d. Kelurahan Labuh Baru Timur
3. Kecamatan Marpoyan Damai
 - a. Kelurahan Tangkerang Barat
 - b. Kelurahan Tangkerang Tengah
 - c. Kelurahan Wonorejo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kelurahan Sidomulyo Timur
 - e. Kelurahan Maharatu
4. Kecamatan Bukit Raya
- a. Kelurahan Simpang Tiga
 - b. Kelurahan Tangkerang Labui
 - c. Kelurahan Tangkerang Utara
 - d. Kelurahan Tangkerang Selatan
5. Kecamatan Sukajadi
- a. Kelurahan Kampong Tengah
 - b. Kelurahan Kampong Melayu
 - c. Kelurahan Kedung Sari
 - d. Kelurahan Harjo Sari
 - e. Kelurahan Sukajadi
 - f. Kelurahan Pulau Karam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kontribusi Penagihan aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak secara umum tergolong masih dalam kriteria kurang, hal tersebut dikarenakan tindakan penagihan aktif masih belum efektif dilakukan, yang sebagian besar faktor ketidakefektivannya, disumbangkan oleh kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan beberapa kendala-kendala internal yang terjadi di KPP Pratam Pekanbaru Tampan.
2. Semua prosedur kerja Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
3. Tindakan penagihan aktif menggunakan surat perintah melaksanakan penyitaan cukup berpengaruh, terutama tindakan penyitaan terhadap rekening penanggung pajak yang telah diblokir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan aktif dengan Surat Perintah Melaksanaka Penyitaan dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut.

1. Jurusita perlu mempelajari karakteristik wajib pajak agar dapat mengetahui cara paling efektif untuk melakukan penagihan yang bersifat persuasif terhadap penunggak pajak.
2. Jurusita perlu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mempermudah aksesnya menagih tunggakan pajak terhadap wajib pajak.
3. *Upgrade dan Maintenance* SIDJP secara berkala harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemberian Diklat kepada pegawai tentang SIDJP agar sistem tersebut dapat berfungsi secara optimal.
4. Perlunya payung hukum yang kuat untuk memperkuat posisi penagihan aktif di mata hukum dan pemberian sanksi tegas kepada penunggak pajak yang tidak mengindahkan peraturan perpajakan.
5. Diharapkan penagihan aktif dapat lebih berperan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282.

Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Bumi Aksara.

Bohari. 2018. *Pengantar Hukum Pajak*. Depok: Rajawali Pers.

Fitriandi, Aryanto dan Priyono. 2018. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Bawono dan Dara. 2020. *Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ilyas, Wirawan dan Suhartono, Rudy. 2012. *Perpajakan : Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudirman, Amiruddin. 2016. *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Empatdua Media.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Susyanti Jeni, dan Ahmad Dahlan. 2020. *Perpajakan Untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media.

Velayati, Mala Rizkika. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

<https://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/hukum-hutang-dalam-islam> (di akses 18 Juli 2021)



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
3. Lampiran 3 : Surat Bimbingan Laporan Penelitian
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
5. Lampiran 5 : Biografi Penulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana Prosedur Penagihan Aktif Tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Penyitaan dalam Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

Jawab :

- 1) Dalam pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a) memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b) memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c) memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan.
- 2) Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap pelaksanaan Penyitaan.
- 3) Berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- 4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, maka Jurusita Pajak:
 - a) mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita; dan
 - b) menandatangani berita acara pelaksanaan sita tersebut bersama saksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada huruf (4) tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 6) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi, dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada huruf (3) berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- 7) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada huruf (6) tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 8) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita atau di tempat Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita berada atau di tempat umum.
- 9) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak terkait meliputi:
 - a) Kepolisian Republik Indonesia, untuk Barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - b) Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - c) Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;
 - d) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal;atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk pesawat terbang.

2. Berapa besar Kontribusi Penagihan Aktif Tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Penyitaan dalam Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

Jawab :

- Besar kontribusi tindakan Penyitaan terhadap realisasi pencairan piutang pajak tahunan dapat mencapai 12%-21% dari total realisasi pencairan piutang pajak tahunan. Memang kontribusinya tidak terlalu signifikan dikarenakan wajib pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan masih cukup patuh dan kooperatif dalam memenuhi kewajibannya sehingga tindakan penagihan tidak banyak yang sampai ke tahap penyitaan melainkan cukup sampai tahap Surat Teguran dan Surat Paksa.

3. Apakah tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

Jawab :

- Iya cukup berpengaruh, terutama tindakan penyitaan terhadap rekening penanggung pajak yang telah diblokir. Tindakan pemblokiran dan penyitaan rekening sangat efektif dilakukan terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif dalam memenuhi kewajibannya karena dapat memberikan efek jera. Selain itu tindakan

pemindahbukuan saldo rekening ke kas negara atas rekening penanggung pajak yang telah disita juga lebih efisien dilakukan dalam merealisasikan pencairan piutang pajak dibanding dengan menjual asset sita melalui lelang karena tidak membutuhkan waktu yang lama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1984/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 23 Maret 2021 M
9 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 247
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Hannysa Putri Herdifa
NIM. : 01870624189
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Tunggal Pajak Dengan Surat Perintah Penyitaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fckonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2086/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 26 Maret 2021 M
12 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. **Sahwitri Triandani, SE., M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Hannysa Putri Herdifa
NIM : 01870624189
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Tunggakan Pajak Dengan Surat Perintah Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

JALAN MR. SM. AMIN RING ROAD ARENGKA II, PEKANBARU 28293
TELEPON (0761) 40836; FAKSIMILE (0761) 859955; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-44/WPJ.02/KP.0401/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andriyanto Cahyadi
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hannysa Putri Herdifa
NIM : 01870624189
Jurusan : D3 Administrasi Perpajakan
Universitas : UIN Suska Riau

Kami sampaikan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan Riset / Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Andriyanto Cahyadi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 Juli 2000, Merupakan putri dari Ayah yang bernama Zulfami dan Ibu bernama Sutihermi. Penulis mengawali pendidikan di SD 03 YKPP Dumai pada tahun 2005-2011, setelah itu penulis melanjutkan sekolah di MTS AL-FALAH Dumai pada tahun 2011-2014, kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMAN 2 Dumai pada tahun 2014-2017. Dan di tahun 2018 penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Diploma 3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan selama dua bulan, yaitu dari bulan Juli hingga Agustus 2020. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul : **“ KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**.